

**MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI
UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL****Riri Restika¹, Wulan Miftah Maqfirah², Irsyad Dahri³**^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar¹rrestika057@gmail.com, ²wulanwulann77@gmail.com, ³irsyad.dhahri@unm.ac.id**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara negara dan masyarakat menjalankan komunikasi internasional. Diplomasi yang sebelumnya lebih banyak berlangsung melalui jalur formal kini berkembang melalui media digital, media sosial, dan berbagai ruang komunikasi daring. Perubahan tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi pemuda untuk terlibat sebagai aktor non-negara dalam mendukung diplomasi digital. Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan diplomasi di era digital, bentuk peran pemuda, peluang dan tantangan partisipasi pemuda, serta strategi pemanfaatan teknologi untuk memperkuat diplomasi digital Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, laporan lembaga internasional, dan sumber resmi yang relevan dengan diplomasi digital, partisipasi pemuda, media sosial, dan kecerdasan digital. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa teknologi digital memperluas akses pemuda terhadap informasi internasional, memungkinkan komunikasi lintas negara, membangun jejaring, serta membuka ruang bagi produksi konten dan kampanye mengenai isu global. Namun, partisipasi tersebut menghadapi tantangan berupa kesenjangan akses digital, rendahnya literasi, misinformasi dan disinformasi, ujaran kebencian, serta risiko salah memahami konteks budaya. Oleh karena itu, penguatan diplomasi digital Indonesia perlu dilakukan melalui peningkatan literasi digital, komunikasi lintas budaya, pemahaman isu global, partisipasi digital yang bermakna, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Pemuda perlu ditempatkan bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai aktor yang mampu berkontribusi secara kritis, kreatif, etis, dan bertanggung jawab dalam memperkuat citra serta kepentingan Indonesia di tingkat internasional.

Kata kunci: diplomasi digital, pemuda, teknologi, media sosial, Indonesia, literasi digital

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa transformasi signifikan dalam praktik hubungan internasional, khususnya dalam ranah diplomasi. Konsep diplomasi digital muncul sebagai respons terhadap kebutuhan negara-negara untuk memanfaatkan platform digital dalam menjalin komunikasi, mempromosikan kepentingan nasional, dan membentuk opini publik global (Bjola & Holmes, 2015). Secara tradisional, diplomasi diartikan sebagai praktik yang berpusat pada tindakan negara dalam hubungan internasional. Pandangan ini sudah sangat kuat dan membuat pembahasan tentang diplomasi cenderung hanya fokus pada upaya memaksimalkan kemampuan bernegosiasi guna memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara.

Pergeseran dari diplomasi tradisional yang dilakukan secara langsung menjadi diplomasi yang menggunakan media digital, media sosial, dan komunikasi online sebagai alat strategis. Diplomasi digital bukan hanya cara berkomunikasi, tetapi juga alat dalam kebijakan luar negeri yang membantu negara menyampaikan kekuatan lunak dengan lebih efektif.

Diplomasi digital bukan menggantikan diplomasi biasa, melainkan justru memperkuat upaya negara dalam berhubungan dengan negara lain secara lebih cepat dan efektif. Diplomasi digital menjadi bagian penting dalam mewujudkan dan mendorong tujuan kebijakan luar negeri, memperluas kerja sama internasional, serta memengaruhi orang-orang yang tidak pernah ke kantor kedutaan atau negara lain. Interaksi langsung dengan masyarakat dan keterlibatan pihak-pihak nonpemerintah membuat pemerintah menggunakan media sosial dan diplomasi digital sebagai cara untuk mempertahankan kredibilitas serta membangun atau memperkuat hubungan di dunia yang terus berubah.

Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang semakin banyak menggunakan teknologi digital dalam diplomasi internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada Center for Digital Society menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 di antara 203 negara untuk kegiatan diplomasi digital.

Di masa globalisasi yang ditandai oleh keterhubungan lintas batas dan peningkatan kecepatan. Transformasi digital kini semakin berkembang, dan peran generasi muda menjadi semakin penting dalam menentukan arah masa depan. Generasi muda tidak hanya menjadi penerima berbagai perubahan global, tetapi juga memiliki kemampuan besar untuk menjadi subjek yang aktif dan berpikir kritis dalam merespons berbagai isu yang melibatkan beberapa negara, seperti krisis iklim, ketimpangan ekonomi, konflik kemanusiaan, dan kemajuan teknologi (UNESCO, 2023).

Salah satu contoh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan (DSWD) melaporkan pada hari Selasa bahwa KTT Pemuda ASEAN 2026 akan diselenggarakan di Philippine International Convention Center (PICC) di Pasay City. Bekerja sama dengan Komisi Pemuda Nasional (NYC), dan dukungan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT), KTT pemuda yang dipimpin oleh DSWD akan diadakan pada tanggal 5 dan 6 Agustus.

Artikel ini menjelaskan bagaimana teknologi bisa membantu para pemuda berperan dalam diplomasi dan juga bagaimana partisipasi pemuda bisa mendorong perubahan cara diplomasi dilakukan di masa kini yang semakin digital.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan teknologi mengubah praktik diplomasi di era digital?
2. Bagaimana pemuda dapat berperan dalam diplomasi melalui teknologi?
3. Apa peluang dan tantangan pemberdayaan pemuda dalam diplomasi digital?
4. Bagaimana pemanfaatan teknologi dapat mendukung perkembangan diplomasi Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perkembangan teknologi digital dan pengaruhnya terhadap praktik diplomasi; (2) menganalisis bentuk serta peran pemuda dalam praktik diplomasi melalui teknologi digital; (3) mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi pemuda dalam diplomasi digital; dan (4) menganalisis pemanfaatan teknologi sebagai instrumen untuk mendukung dan memperkuat diplomasi digital Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan diplomasi digital dan menganalisis hubungan antara pemanfaatan teknologi, partisipasi pemuda, media sosial, serta kepentingan diplomasi Indonesia. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, publikasi pemerintah, dan sumber akademik lain yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan identifikasi literatur yang berkaitan dengan konsep diplomasi digital, diplomasi publik, *soft power*, partisipasi pemuda, literasi digital, komunikasi lintas budaya, dan penggunaan media sosial dalam hubungan internasional. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema pembahasan. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep dan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran mengenai peluang, tantangan, serta strategi pemberdayaan pemuda dalam diplomasi digital. Penelitian ini tidak menggunakan survei atau wawancara, sehingga kesimpulan yang dihasilkan merupakan sintesis dari sumber-sumber kepustakaan yang dianalisis.

PEMBAHASAN

a. Diplomasi di Era Digital

Politik luar negeri mencakup dua hal utama, yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Cara satu untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara, dan alat utama dalam kebijakan luar negeri adalah diplomasi. Interaksi antara tujuan nasional dan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya sudah menjadi topik penting yang dibahas oleh negara tersebut. Diplomasi digital menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah negara untuk memperjuangkan tujuan nasional.

Diplomasi digital dapat diartikan ke dalam dua kata, yaitu diplomasi dan digital. Diplomasi sesungguhnya memiliki makna yang sama dengan negosiasi yang artinya sebuah seni tawar-menawar yang dilakukan oleh para aktor baik negara maupun non-negara. Diplomasi merupakan suatu cara untuk mencapai kepentingan nasional negara. Aktor yang memiliki peran penting dalam melakukan diplomasi ialah negara melalui perwakilannya para diplomat dan juga aktor non-negara seperti organisasi internasional. Sementara kata digital merujuk pada teknologi, informasi dan komunikasi yang mulai berkembang pada masa globalisasi (Bjola, 2016)

Diplomasi digital menjadi bagian penting dalam mencapai dan meningkatkan tujuan kebijakan luar negeri, memperluas dukungan internasional, serta membentuk opini orang-orang yang belum pernah berkunjung ke kedutaan atau negara lain. Interaksi langsung dengan masyarakat dan keterlibatan pihak-pihak yang bukan pemerintah membuat negara menggunakan media sosial dan diplomasi digital sebagai cara untuk mempertahankan kredibilitas dan memperkuat hubungan dalam dunia yang terus berubah. Perkembangan teknologi tidak menghilangkan fungsi tersebut, tetapi mengubah cara diplomasi dijalankan.

Media sosial menjadi sarana utama dalam praktik diplomasi digital karena memungkinkan interaksi langsung antara negara dengan audiens global tanpa melalui perantara tradisional. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan LinkedIn membantu menyampaikan pesan diplomatik secara cepat, luas, dan terukur, serta memungkinkan pemantauan respons dari audiens secara langsung. Hocking & Melissen (2015) menekankan bahwa media sosial bukan hanya alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sarana untuk terlibat dengan masyarakat internasional. Media sosial memungkinkan adanya interaksi dan dialog antara negara dengan komunitas internasional. Selain itu, media sosial juga menjadi alat diplomasi yang efektif dalam memperkuat citra negara. Negara bisa memperkenalkan budaya, pariwisata, inovasi teknologi, dan program kebijakan luar negeri melalui iklan online, sehingga memperkuat pengaruh secara besar-besaran.

Diplomasi digital dianggap sebagai salah satu tren utama abad ke-21 dalam komunikasi diplomatik. Berkat kemajuan luar biasa dalam teknologi informasi, internet dan sosial media, cara merealisasikan dan mempresentasikan diplomasi telah berubah secara radikal dan semakin dihilangkan dari unsur-unsur diplomatik tradisional. Diplomasi tradisional dipandang sebagai bidang kegiatan yang bersifat formal dan rahasia, yang terjadi dalam jaringan kontak yang sangat terbatas. Perbedaan utama antara diplomasi digital dengan diplomasi tradisional terletak pada akses yang lebih besar ke informasi, serta interaksi yang lebih besar antara individu dan organisasi, dan transparansi yang lebih besar. Lebih dari itu, apa yang membuat diplomasi digital dan jenis-jenis diplomasi sebelumnya Berbeda adalah cara sederhana dalam menjalankan diplomasi karena tidak perlu berada di tempat yang sama secara fisik.

Karena globalisasi terjadi dan mendorong perkembangan informasi serta teknologi, pada saat yang sama, diplomasi juga berkembang menjadi bentuk yang lebih beragam, termasuk diplomasi digital. Diplomasi digital membuka lebih banyak peluang untuk mendengar berbagai pendapat dari berbagai pihak, sehingga proses diplomasi menjadi lebih bijak, lebih cepat, lebih ringan, dan lebih terhubung dalam jaringan. Banyak orang memperhatikan dengan saksama kondisi dunia, sehingga pemerintah negara harus bijak dalam mengelola kelemahan kebijakannya sendiri.

Negara menggunakan metode baru agar dapat berhubungan dan berinteraksi dengan negara lain di dunia demi mencapai tujuan serta menjaga keberlanjutan tujuan tersebut. Ini adalah transformasi diplomatik terbesar sejak Perang Dunia Kedua, yang muncul dari revolusi digital. Tugas-tugas diplomasi yang biasa dilakukan berdasarkan lima pilar tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, seperti menghadiri acara, berunding, memberi informasi, melindungi, dan mempromosikan kepentingan negara di hadapan pihak ketiga, mulai mengalami perubahan. Pelaksanaan tugas-tugas seperti itu sekarang akan jauh berbeda. Permintaan akan transparansi, fleksibilitas, dan kedekatan membuat diplomasi tradisional kurang terstruktur dan terpusat.

Perlu dipahami bahwa diplomasi digital bukan menggantikan diplomasi langsung, tetapi lebih sebagai tambahan saja. Media sosial sebagai alat dalam diplomasi digital lebih berperan sebagai pemicu yang mempercepat tercapainya perubahan yang diharapkan di lapangan. Media sosial bisa digunakan dengan baik untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Di zaman digital saat ini, menggunakan media sosial untuk melakukan diplomasi sudah menjadi hal yang wajib dilakukan. Hampir semua pemimpin dunia memiliki akun Facebook dan Twitter serta menggunakan media sosial tersebut sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam diplomasi. Dalam hal diplomasi ekonomi, media sosial sangat cocok untuk mempercepat tujuan yang ingin dicapai.

b. Peran Pemuda dalam Praktik Diplomasi

Masalah diplomasi tidak hanya terjadi di pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat umum. Hal ini menjadikan pelajar dan mahasiswa sebagai bagian yang penting dalam diplomasi. Muncul istilah Diplomasi publik pelajar atau mahasiswa, yang juga disebut sebagai citizen

diplomacy, menunjukkan bahwa semua orang dapat berperan dalam hubungan internasional elemen bangsa ikut terlibat dalam diplomasi karena setiap warga negara yang sedang berada di luar negeri atau dalam negeri dapat berperan serta dalam menjaga hubungan antar bangsa berada di negara lain adalah duta bangsa. Keberadaan mereka mewakili citra suatu bangsa. Ucapan, tingkah laku, termasuk pakaian selalu berkaitan dengan tempat asal seseorang. Sama halnya dengan pertukaran pemuda, mahasiswa, dan pemberian beasiswa juga menjadi bagian dari tersebut dari diplomasi modern yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan diplomasi sains. Kemajuan suatu negara dan peradaban global tergantung pada adanya komunikasi dan. Interaksi langsung antara pelajar atau mahasiswa dengan diplomat baik di dalam negeri maupun di luar negeri maupun di luar negeri serta interaksi dengan beberapa elemen negara menjadi bagian sebuah aksi diplomasi. Maka diplomasi adalah seni untuk berkomunikasi dan bernegosiasi yang biasanya terkait dengan hubungan internasional. Melalui jalur Diplomasi adalah cara sebuah negara memperkenalkan keunggulan, kekuatan, dan keberadaannya. Melalui jalur diplomasi, sebuah negara juga berusaha menyebarluaskan pengaruhnya dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan negaranya.

Salah satu ciri dari seorang pemuda atau mahasiswa adalah kemampuan berpikirnya yang menjadi garda terdepan dalam membangun suatu bangsa. Dengan kapasitas intelektual inilah Mahasiswa memiliki peran dalam membentuk suatu wilayah global yang harmonis dan damai. Kawasan desa global dipopulerkan oleh Herbert Marshal McLuhan yang diartikan antara lain sebagai kata yang dilihat sebagai sebuah komunitas di dalamnya. Jarak dan kesendirian telah berkurang secara drastis karena media elektronik (seperti televisi dan internet). Dalam arti yang lebih sempit, diplomasi adalah cara untuk menciptakan perdamaian melalui kerjasama dan perundingan maka peran mahasiswa adalah membangun dunia yang lebih baik daripada tengah mengalami penurunan kualitas lingkungan, sosial, dan ancaman perang serta terorisme.

Pemuda dalam perannya jelas tidak bisa langsung terlibat dalam perundingan dua hala dan pelbagai hala. Akan tetapi, ide dan pemikiran tidak akan sirna sementara diperjuangkan sebagai elemen dari diplomasi digital. Jika siswa, mahasiswa, peneliti menghadapi tantangan dalam mengakses dunia diplomatik, sebagai bagian dari kelompok intelektual di wilayah dan negara mereka dapat menyampaikan ide-ide mereka melalui media. sosial dan tulisan yang telah tersedia serta program aplikasi yang mendukung yang dapat dibuat dalam jangka waktu yang singkat. Kaum muda juga dapat melakukan pengadvokasian untuk masalah-masalah yang dianggap krusial dalam mempertahankan kesatuan bangsa yang harus dipahami masyarakat internasional.

Masyarakat di sini tidak hanya menetapkan kebijakan, tetapi juga para aktivis dan media internasional di media sosial dan ini sering dilakukan oleh berbagai negara berkembang serta negara-negara maju.

Mahasiswa adalah bagian social control yang membantu mengawasi dan mengendalikan pemerintah apabila penyelenggaraannya bertentangan terhadap konstitusi dan undang-undang. Peningkatan kemampuan berpikir mahasiswa di kampus saat ini sedang ditingkatkan kapasitas intelektual. Mereka dilatih agar dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara maksimal motorik. Aspek kognitif berarti mahasiswa dilatih untuk menggunakan keenam indranya untuk memahami dunia di sekitar dengan fokus pada ilmu pengetahuan masing-masing. Dengan bekal ini membuat mahasiswa menjadi generasi penerus peradaban ke tingkat selanjutnya bukan berarti mundur seperti terjadi perang tanpa henti atau konflik yang sempit saja banyak terjadi belakangan ini. Oleh karena itu komponen peningkatan kapasitas intelektualitas menjadi porsi utama. Dengan melalui kerja sama secara virtual maka mahasiswa dapat mengakselerasi proses pencapaian keilmuannya. Disinilah diplomasi Digital dapat menjadi alat yang penting dalam membangun kemampuan cerdasnya yang diimbangi dengan kekuatan moral yang harus dimiliki seorang moral. Yang baik, karena mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah masyarakat disuatu negara.

c. Peluang dan Tantangan Pemuda dalam Diplomasi Digital

Meski anak muda memiliki kemampuan luar biasa dalam membentuk pandangan dunia yang lebih luas, masih ada beberapa kesulitan yang perlu mereka hadapi. Perbedaan akses terhadap pendidikan, kurangnya kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, serta ketimpangan sosial menjadi hambatan utama dalam upaya menciptakan kesadaran global yang merata.

Dalam konteks Indonesia, daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih mengalami perbedaan dalam akses terhadap informasi global serta pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai universal (Kurniawati & Nugroho, 2022). Masalah lainnya adalah kurangnya partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan. Banyak kebijakan di tingkat global dan nasional masih belum memperhatikan suara anak muda secara serius. Ini membuat perbedaan antara kebijakan yang dibuat dan keadaan sebenarnya yang dihadapi oleh generasi muda. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan bottom-up dalam membuat kebijakan agar suara pemuda lebih terdengar dan memiliki pengaruh (UNESCO, 2023). Selain itu, diperlukan upaya cepat untuk memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan nilai global sejak jenjang dasar. Pendidikan bukan hanya tentang berpikir, tetapi juga perasaan dan budi pekerti. Integrasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai global dapat menjadi dasar yang kuat dalam membentuk karakter pemuda yang mampu berpikir lokal namun mampu bertindak di tingkat global (Anderson, 2020).

Untuk mencapai tujuan pembangunan karakter, hal tersebut harus kembali pada dasar-dasar hakikat manusia yang bersifat monopluralis. Unsur-unsur dari konsep monopluralis mencakup struktur kodrat manusia, yang meliputi jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu maupun sosial, serta posisi kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang mandiri dan juga sebagai makhluk Tuhan yang satu (Irawan & Prasetyo, 2022). Di tengah arus globalisasi yang begitu cepat, membuat negara-negara saling terhubung, muncul tantangan berupa homogenisasi budaya. Hal ini terjadi karena gaya hidup dari Barat yang mendominasi, yang bisa merusak nilai-nilai moral dan menyebabkan krisis identitas pada generasi muda. Meskipun begitu, globalisasi juga membuka kesempatan untuk adanya campuran budaya, sehingga generasi muda bisa kembali menghargai tradisi lokal dengan cara yang lebih modern dan sesuai dengan zaman.

Globalisasi digital mengubah nilai-nilai yang ada dan memengaruhi keberlanjutan identitas lokal di Indonesia. Fenomena ini menciptakan situasi yang membingungkan, di satu pihak membawa risiko terhadap nilai-nilai moral, namun di pihak lain memberi kesempatan untuk berkembang secara kreatif jika dihadapi dengan cara yang cerdas dan strategis oleh organisasi kepemudaan.

Informasi yang berlebihan di dunia maya membuat batas nilai-nilai konvensional yang biasanya diajarkan melalui keluarga, interaksi sosial, dan ajaran agama jadi tidak jelas lagi (Alfiana & Najicha, 2022). Akibatnya, terjadi perbedaan nilai yang cukup jelas antar generasi, terutama terkait semakin kuatnya pemahaman tentang individualisme, batasan privasi pribadi, serta cara menginternalisasi nilai keagamaan. Jika generasi muda tidak berhasil menutupi perbedaan nilai ini, mereka akan sangat rentan mengalami keterasingan sosial dari lingkungan sekitarnya. Bukan hanya melihat teknologi digital sebagai ancaman, generasi muda bisa menggunakan cara "silat budaya", yaitu memanfaatkan kekuatan dari arus global untuk mempromosikan identitas bangsa secara lebih luas. Praktik ini sering digunakan oleh para pembuat konten yang mengemas berbagai elemen tradisional seperti dialek daerah, tarian tradisional, sketsa komedi lokal, hingga makanan khas Nusantara ke dalam bentuk audio visual yang modern dan populer (Tanjung, 2025). Pendekatan kreatif itu berhasil meningkatkan interaksi penonton, bahkan sampai mencapai audiens dari berbagai negara.

d. Pemanfaatan Teknologi dalam perkembangan Diplomasi di Indonesia

Pesatnya kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan infrastruktur informasi global di era globalisasi saat ini telah mengubah cara kerja dan perkembangan di bidang ekonomi, industri, perdagangan, dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi yang mengandalkan ilmu pengetahuan dan masyarakat yang memanfaatkan informasi kini menjadi pola pikir utama di seluruh dunia. Indonesia sedang berusaha memanfaatkan potensi teknologi dengan baik agar tidak tertinggal dalam bidang teknologi. Akses dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih belum merata, hal ini bisa menghambat upaya Indonesia dalam melakukan diplomasi ekonomi.

Di masa depan, diharapkan provinsi-provinsi di Indonesia akan berkembang pesat secara ekonomi dan ilmu pengetahuan teknologi, yang didukung oleh tenaga kerja yang memiliki kualitas tinggi. Pemerintah daerah harus berinovasi agar bisa mempercepat pengembangan teknologi secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus tetap gigih dalam menjaga komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesiapan masyarakat, sehingga bisa mempercepat proses pengembangan dan pemberdayaan teknologi secara terorganisir.

Hasil penelitian yang dilakukan di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Sumatera Selatan pada tahun 2019, serta Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Bali pada tahun 2020. Lima provinsi tersebut memiliki potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang cukup baik. Lima provinsi tersebut adalah daerah dengan lingkungan yang relatif aman, teratur, dan tenang. Dalam hal pariwisata, jumlah wisatawan yang datang ke daerah ini diperkirakan akan terus bertambah. Sedari tahun 2019, lima provinsi itu mulai menerapkan program digital province. Dengan program ini, semua kegiatan dilakukan menggunakan teknologi digital, termasuk dalam mempromosikan penyelenggaraan berbagai acara wisata. Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pengusaha, dan masyarakat tidak hanya membentuk kerja bersama yang kuat dalam memajukan ekonomi daerah, tetapi juga mempercepat hubungan antar provinsi di Indonesia. Sampai di tingkat sektoral, kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah pengunjung wisata tetapi juga berbagai bidang ekonomi seperti usaha kecil menengah, manufaktur, dan jasa.

Upaya untuk menjadi provinsi yang lebih digital dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu cara untuk mempromosikan serta menyebarkan program dan kebijakan pemerintah, serta berinteraksi dan mengumpulkan aspirasi masyarakat, sehingga tercapai kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Penggunaan media sosial ini sesuai dengan aturan dalam reformasi birokrasi, seperti penggunaan teknologi informasi, pemerintahan berbasis elektronik, strategi komunikasi, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, serta penyusunan tata laksana yang tepat.

Salah satu hal penting dalam diplomasi berbasis teknologi adalah perubahan dalam keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, serta antara aktor negara dan aktor nonnegara. Perubahan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah semakin berkurang, sementara peran lembaga nonpemerintah menjadi lebih besar. Perbedaan jumlah pelaku dan kepentingan yang terlibat dalam membuat kebijakan luar negeri memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja sama satu sama lain. Kementerian Luar Negeri kini memiliki lebih banyak cara untuk menyebarkan informasi dengan lebih efektif dan lebih cepat. Namun di sisi lain, warga negara meminta lebih banyak transparansi dan pertanggungjawaban, serta mengkritik keputusan kebijakan luar negeri baik kepada pengambil kebijakan maupun antar aktor non negara.

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang semakin banyak memanfaatkan teknologi digital dalam urusan diplomatik internasional. Menurut survei, Indonesia menduduki peringkat ke-38 dari 209 negara dalam Digital Diplomacy Review 2017. Peringkat ini turun

dibandingkan tahun sebelumnya, ketika Indonesia berada di posisi yang lebih tinggi satu tingkat. Indonesia berada di belakang negara-negara Eropa yang memiliki teknologi canggih seperti Prancis dan Inggris, serta negara-negara Asia seperti Jepang dan India. Namun, Indonesia berada di depan beberapa negara di Asia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada Center for Digital Society menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-9 dari 203 negara dalam hal kegiatan diplomasi digital.

Diplomasi secara tradisional dilakukan dengan komunikasi yang diatur oleh, dan antara, lembaga internasional, kedutaan, serta pemerintah. Tren saat ini, dengan akses yang lebih mudah ke internet dan teknologi digital, membuat diplomasi juga mulai menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi digital. Di Indonesia, ada banyak platform media sosial, seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. Hampir semua orang menggunakan media sosial sebagai cara untuk mendapatkan informasi dan bersenang-senang. Namun, media sosial juga bisa digunakan oleh para diplomat sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara langsung dan cepat. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga sangat membantu pekerjaan para diplomat dalam menyampaikan laporan atau menyelesaikan masalah yang membutuhkan keputusan cepat.

Negara-negara Barat tampak sudah siap menghadapi masa kini yang bergerak cepat di bidang diplomasi digital, sehingga Amerika, Australia, dan Kanada sudah membangun fondasi yang cukup matang sejak lama. Amerika Serikat, sebagai negara yang pertama menerapkan diplomasi digital dalam urusan luar negerinya, pada tahun 2002 membangun tim khusus di Kementerian Luar Negeri yang fokus pada eDiplomasi.

Sejak saat itu, upaya membentuk opini masyarakat untuk mendukung misi luar negeri Paman Sam dilakukan secara besar-besaran melalui internet dan televisi. Sentimen negatif serangan AS Kasus Irak dan Afghanistan pada awal 2000-an yang merusak citra mereka di dunia hanya terjadi singkat. Berita-berita negatif dan merugikan bisa diredam. Melalui CNN, VoA, dan internet, AS menyebarkan propaganda yang terorganisir dan teratur, sehingga masyarakat dunia memahami bahwa serangan AS ke wilayah tersebut bertujuan untuk menangkal terorisme, menghancurkan senjata pemusnah massal, dan mendorong berkembangnya demokrasi.

Indonesia dalam melakukan diplomasi di kawasan selalu menghadapi serangan dari diplomasi digital, terutama dari negara-negara tetangga. Seperti terjadi pada tahun 2015, Australia melakukan diplomasi digital untuk menyelamatkan warga negaranya yang dikenal sebagai komplotan Bali Nine, yang akan dieksekusi karena kasus narkoba. Setelah berbagai upaya lobi resmi yang melibatkan pemerintahan kedua negara untuk menyelamatkan Bali Nine gagal, pemerintah Australia akhirnya menggunakan diplomasi elektronik melalui media. Pemerintah dan warga Australia mengancam akan memboikot wisata di Bali jika hukuman mati tetap diterapkan. Menlu Julia Bishop dan Senator Independen Jacqui Lambie mengancam akan menghentikan bantuan internasional kepada Indonesia jika pemerintah tetap melanjutkan eksekusi terhadap warga negaranya tersebut.

Dalam diplomasi digital, di masa depan perlu dilakukan usaha yang sungguh-sungguh agar diplomasi ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang hubungan bilateral, kerja sama budaya, dan ekonomi saja. Sebaliknya, kita harus berani melihatnya dari sudut pandang potensi krisis. Dengan dibentuknya Badan Cyber Nasional (BCN), instrumen diplomasi digital bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional kita dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

Masa 2022-2023 menjadi waktu yang penting bagi Indonesia untuk menunjukkan keberadaannya di tingkat dunia. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi presiden G20, sedangkan pada tahun 2023, Indonesia menjabat ketua ASEAN. Kedua agenda tersebut memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat perannya dalam kerja sama internasional serta memperkenalkan berbagai kebijakan dan kontribusinya dalam menghadapi berbagai isu global. Dalam penerapannya, Twitter digunakan sebagai salah satu media utama untuk menyebarkan

informasi mengenai berbagai agenda internasional tersebut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Twitter dalam diplomasi digital membantu membentuk citra positif Indonesia di tingkat internasional. Berbagai konten yang membahas Presidensi G20, Ketetapan ASEAN, kerja sama internasional, dan promosi budaya Indonesia menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep *soft power* yang diajukan oleh Nye (2008). Menurut Nye (2008), sebuah negara bisa memengaruhi pihak lain karena daya tarik yang dimilikinya, seperti budaya, nilai, dan kebijakan. Dalam penelitian ini, Twitter digunakan sebagai alat untuk menunjukkan peran aktif Indonesia dalam berbagai isu internasional sekaligus memperkenalkan nilai dan identitas negara kepada masyarakat dunia. Selain itu, Anholt (2007) menjelaskan bahwa citra sebuah negara bisa terbentuk melalui komunikasi yang mampu menciptakan kesan positif di kalangan masyarakat internasional. Oleh karena itu, berbagai informasi tentang kerja sama internasional, budaya, dan sumbangan Indonesia dalam forum global yang disampaikan melalui Twitter bisa membantu memperkuat citra Indonesia di mata dunia.

e. Strategi Pemberdayaan Pemuda melalui Teknologi dalam Diplomasi Digital

Pemberdayaan pemuda melalui teknologi menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan diplomasi digital. Di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemuda tidak hanya dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga memiliki peluang untuk berperan sebagai aktor yang menghasilkan gagasan dan solusi inovatif terhadap berbagai persoalan sosial dan global. Caputo (2022) menjelaskan pentingnya peran generasi muda dalam menghadapi perubahan dan mendorong inovasi di tengah perkembangan teknologi. Kedekatan pemuda dengan teknologi digital dan media sosial juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam komunikasi lintas negara. Keterlibatan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penerimaan informasi mengenai isu internasional, tetapi juga melalui kemampuan untuk memproduksi, menyebarkan, dan mendiskusikan informasi mengenai berbagai persoalan global. Dalam konteks diplomasi digital, kondisi tersebut membuka ruang bagi pemuda untuk turut membangun komunikasi dan pertukaran gagasan yang melampaui batas negara.

Strategi pertama dalam pemberdayaan pemuda melalui teknologi adalah peningkatan literasi digital. Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah mengubah cara individu memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu, literasi digital menjadi fondasi penting agar pemuda mampu menggunakan teknologi secara kritis, bertanggung jawab, dan produktif. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan mencari informasi, mengevaluasi kredibilitas sumber, memahami konteks informasi, serta membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang menyesatkan. Hal ini menjadi semakin penting dalam diplomasi digital karena informasi yang disampaikan melalui media digital dapat tersebar dengan cepat dan menjangkau masyarakat di berbagai negara. Pemuda yang memiliki literasi digital yang baik tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga mampu menjadi produsen informasi yang dapat membangun pemahaman publik mengenai isu internasional secara lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, peningkatan literasi digital dapat menjadi dasar bagi pemuda untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam praktik diplomasi digital.

Selain literasi digital, kemampuan komunikasi lintas budaya merupakan bagian penting dalam pemberdayaan pemuda di bidang diplomasi digital. Interaksi yang terjadi melalui teknologi mempertemukan individu dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, nilai, dan kebiasaan yang berbeda. Pemahaman terhadap komunikasi antarbudaya membantu individu memahami bagaimana latar belakang budaya dapat memengaruhi cara seseorang menyampaikan pesan, menafsirkan informasi, serta merespons suatu interaksi. Dalam diplomasi, kemampuan tersebut menjadi penting karena keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh cara pesan tersebut disampaikan dan diterima oleh

pihak lain. Oleh karena itu, pemuda perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa yang tepat, memahami perbedaan nilai dan norma, serta menghargai perspektif budaya yang berbeda. Penguasaan komunikasi lintas budaya dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan menciptakan interaksi digital yang lebih efektif dalam hubungan internasional.

Strategi selanjutnya adalah peningkatan pemahaman mengenai isu global. Kemampuan menggunakan teknologi digital perlu diimbangi dengan pengetahuan mengenai hubungan internasional, ekonomi global, lingkungan, keamanan, hak asasi manusia, serta berbagai persoalan sosial yang berkembang di tingkat internasional. Melalui internet dan berbagai platform digital, pemuda memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dan berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya serta perspektif yang berbeda. Kondisi tersebut dapat membantu pemuda memahami bahwa suatu persoalan global tidak selalu memiliki satu sudut pandang, melainkan dapat memiliki berbagai dimensi dan dampak yang saling berkaitan. Pemahaman tersebut juga dapat meningkatkan kemampuan pemuda dalam menganalisis isu secara kritis sebelum menyampaikan pendapat atau informasi melalui ruang digital. Dalam konteks diplomasi digital, pengetahuan mengenai isu global menjadi penting agar keterlibatan pemuda tidak berhenti pada aktivitas komunikasi, tetapi juga didukung oleh pemahaman substansial terhadap isu yang dibicarakan.

Namun, pemberdayaan pemuda melalui teknologi tidak berarti bahwa seluruh bentuk partisipasi digital secara otomatis menghasilkan dampak positif. Partisipasi digital perlu diarahkan pada keterlibatan yang bermakna (*meaningful youth participation*) dengan mempertimbangkan tujuan, aktor, konteks, bentuk, dan tingkat keterlibatan pemuda. Cho, Byrne, dan Pelter (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan sipil pemuda di ruang digital memiliki berbagai bentuk dan dipengaruhi oleh konteks, faktor pendukung, hambatan, literasi digital, serta risiko yang muncul dalam lingkungan digital. Dengan demikian, keberhasilan pemberdayaan pemuda tidak semata-mata diukur berdasarkan banyaknya konten yang diproduksi atau aktivitas yang dilakukan di media sosial. Kualitas informasi, kemampuan membangun dialog, pemahaman terhadap konteks, serta kemampuan berinteraksi secara bertanggung jawab menjadi aspek yang juga perlu diperhatikan. Partisipasi yang bermakna memungkinkan pemuda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pihak yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan pemahaman publik dan hubungan sosial maupun internasional.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan pemuda melalui teknologi dalam diplomasi digital perlu dilakukan secara komprehensif. Literasi digital memberikan kemampuan untuk mengelola informasi, komunikasi lintas budaya membangun kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda, sedangkan pemahaman terhadap isu global memberikan dasar pengetahuan untuk terlibat dalam diskusi internasional. Ketiga aspek tersebut perlu disertai dengan partisipasi digital yang bermakna agar penggunaan teknologi tidak hanya menghasilkan aktivitas di ruang digital, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap komunikasi, dialog, dan hubungan internasional. Melalui pendekatan tersebut, pemuda dapat ditempatkan bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam perkembangan diplomasi digital.

f. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda pada Diplomasi Digital

Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi digital yang telah mengubah cara individu berkomunikasi, memperoleh informasi, dan berinteraksi dengan masyarakat di berbagai belahan dunia. Kehadiran berbagai platform media sosial memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, membangun jejaring, serta berpartisipasi dalam pembahasan berbagai isu publik. Perkembangan tersebut turut memengaruhi praktik diplomasi karena komunikasi mengenai isu internasional tidak lagi hanya berlangsung melalui saluran diplomatik formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui ruang digital yang melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Dalam konteks diplomasi digital, media sosial memiliki peran penting dalam memperluas ruang partisipasi masyarakat, khususnya pemuda. Berbeda dengan diplomasi tradisional yang cenderung berlangsung melalui institusi resmi seperti pemerintah, kementerian luar negeri, dan perwakilan diplomatik, diplomasi digital memungkinkan komunikasi dilakukan secara lebih terbuka, cepat, dan interaktif. Melalui media sosial, pemuda dapat mengikuti perkembangan isu internasional, memberikan tanggapan, menyampaikan gagasan, serta terlibat dalam berbagai diskusi yang berkaitan dengan hubungan antarnegara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang partisipasi dalam proses diplomasi digital.

Partisipasi pemuda melalui media sosial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pemuda dapat berperan sebagai penyebar informasi mengenai isu global, pembuat konten edukatif, peserta diskusi internasional, serta penggerak kampanye digital yang berkaitan dengan isu kemanusiaan, lingkungan, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui aktivitas tersebut, pemuda tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan sebagai produsen dan penyebar informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Kemampuan tersebut menjadi penting karena pemuda memiliki kedekatan dengan teknologi digital dan relatif aktif menggunakan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Selain itu, media sosial memungkinkan pemuda membangun komunikasi dan jejaring dengan individu maupun komunitas dari berbagai negara. Interaksi lintas negara tersebut dapat mempertemukan pemuda dengan perspektif, pengalaman, dan budaya yang berbeda sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai persoalan internasional. Diskusi dan pertukaran informasi melalui ruang digital juga dapat mendorong terbentuknya kesadaran terhadap berbagai isu global serta meningkatkan kemampuan pemuda dalam memahami perbedaan perspektif antarnegara. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan antarmasyarakat yang pada akhirnya mendukung terciptanya hubungan internasional yang lebih terbuka dan partisipatif.

Peran media sosial dalam diplomasi digital juga dapat dilihat dari kemampuannya dalam membangun *people-to-people diplomacy*. Melalui komunikasi digital, pemuda dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dari negara lain tanpa harus selalu bergantung pada mekanisme diplomasi formal. Interaksi tersebut dapat menciptakan ruang pertukaran gagasan, membangun kepercayaan, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya antar masyarakat. Dalam konteks ini, pemuda memiliki peluang untuk menjadi aktor non-negara yang turut berkontribusi dalam membentuk persepsi mengenai suatu negara dan isu internasional.

Namun demikian, penggunaan media sosial dalam diplomasi digital juga menghadirkan tantangan. Kemudahan penyebaran informasi dapat disertai dengan penyebaran berita palsu, misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk informasi yang tidak terverifikasi. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemuda dalam diplomasi digital perlu diikuti dengan kemampuan literasi digital, berpikir kritis, serta kecakapan dalam melakukan verifikasi informasi. Pemuda perlu memahami bahwa aktivitas mereka di ruang digital dapat memengaruhi persepsi publik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan demikian, media sosial memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi pemuda pada diplomasi digital. Media sosial tidak hanya memperluas akses pemuda terhadap informasi internasional, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan gagasan, membangun jejaring lintas negara, melakukan kampanye digital, dan berkontribusi dalam pembentukan opini publik mengenai isu-isu global. Pemuda dengan demikian tidak lagi hanya ditempatkan sebagai penerima informasi dalam hubungan internasional, tetapi dapat berkembang menjadi aktor yang secara aktif berpartisipasi dalam praktik diplomasi digital. Pemanfaatan media sosial secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong keterlibatan pemuda dalam diplomasi di era digital.

g. Penguatan Diplomasi Digital Indonesia melalui Partisipasi Pemuda

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat dan semakin terbukanya konektivitas antarnegara telah membawa perubahan dalam berbagai aspek hubungan internasional, termasuk praktik diplomasi. Batas-batas geografis tidak lagi menjadi hambatan utama dalam proses komunikasi antarnegara karena informasi dapat disebarluaskan secara cepat melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut mendorong negara untuk menyesuaikan strategi diplomasi dengan perkembangan teknologi agar komunikasi dan penyampaian kepentingan nasional dapat dilakukan secara lebih efektif. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana dalam pelaksanaan diplomasi, yang kemudian berkembang menjadi diplomasi digital (*digital diplomacy*).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan diplomasi digital memberikan peluang bagi pemuda untuk terlibat secara lebih aktif dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Retno Marsudi menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi secara global dengan melibatkan generasi muda yang memiliki kedekatan dengan teknologi digital. Media sosial dapat menjadi sarana strategis untuk menyampaikan informasi mengenai Indonesia, termasuk budaya, nilai-nilai masyarakat, potensi ekonomi, serta berbagai kebijakan dan isu yang menjadi kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Keterlibatan pemuda dalam ruang digital dengan demikian dapat memperluas jangkauan komunikasi Indonesia kepada masyarakat global sekaligus mendukung pelaksanaan diplomasi digital.

Partisipasi tersebut perlu didukung oleh kemampuan literasi dan kecerdasan digital yang memadai. Kecerdasan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara kritis, etis, dan bertanggung jawab. Putri (2018) menjelaskan bahwa penggunaan media digital perlu dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, kemandirian, demokrasi, disiplin, kreativitas, semangat kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, cinta damai, kepedulian sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi penting dalam membentuk perilaku pemuda ketika berinteraksi di ruang digital, khususnya ketika membawa informasi dan perspektif mengenai Indonesia kepada masyarakat internasional.

Pemuda yang memiliki kecerdasan digital dapat berkontribusi dalam diplomasi digital melalui berbagai aktivitas, seperti membuat konten edukatif mengenai Indonesia, memperkenalkan kebudayaan dan potensi nasional, mengikuti forum dan diskusi internasional secara daring, serta membangun komunikasi dengan pemuda dari negara lain. Aktivitas tersebut dapat menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kepentingan diplomasi Indonesia karena pemuda tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai komunikator yang dapat membentuk persepsi positif mengenai Indonesia di ruang digital.

Oleh karena itu, penguatan diplomasi digital Indonesia perlu diiringi dengan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan literasi dan kecerdasan digital. Pemuda yang mampu memanfaatkan teknologi secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab memiliki peluang untuk menjadi aktor non-negara yang turut mendukung penyebaran informasi positif mengenai Indonesia dan memperkuat hubungan antarmasyarakat di tingkat internasional. Dengan demikian, partisipasi pemuda melalui ruang digital dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat diplomasi digital Indonesia di tengah perubahan lingkungan hubungan internasional.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan penting dalam praktik diplomasi. Diplomasi digital tidak menggantikan diplomasi tradisional, tetapi memperluas instrumen dan ruang interaksi yang dapat digunakan negara maupun aktor non-negara. Media

sosial, komunikasi daring, dan berbagai teknologi informasi memungkinkan penyampaian pesan diplomatik berlangsung lebih cepat, luas, interaktif, dan terbuka. Perubahan tersebut juga membuat hubungan internasional tidak lagi hanya menjadi ruang yang didominasi oleh pemerintah dan diplomat, tetapi semakin melibatkan masyarakat.

Pemuda memiliki posisi strategis dalam perkembangan diplomasi digital karena kedekatan mereka dengan teknologi dan media sosial. Pemuda dapat berkontribusi sebagai produsen informasi, pembuat konten edukatif, peserta forum internasional, penggerak kampanye digital, serta penghubung komunikasi antarmasyarakat dari berbagai negara. Melalui peran tersebut, pemuda dapat mendukung *people-to-people diplomacy* dan membantu memperkenalkan budaya, nilai, potensi, serta kepentingan Indonesia kepada masyarakat internasional.

Meskipun demikian, partisipasi pemuda dalam diplomasi digital tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kesenjangan akses teknologi, kemampuan literasi digital yang belum merata, misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, serta perbedaan budaya dapat menghambat terciptanya komunikasi internasional yang konstruktif. Oleh sebab itu, pemberdayaan pemuda harus diarahkan pada partisipasi yang bermakna, bukan sekadar peningkatan aktivitas di media sosial. Literasi digital, kemampuan berpikir kritis, komunikasi lintas budaya, dan pemahaman terhadap isu global menjadi kompetensi penting yang perlu dikembangkan.

Dalam konteks Indonesia, penguatan diplomasi digital dapat dilakukan dengan membangun kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, komunitas, dan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan ruang partisipasi dan pendidikan digital, perguruan tinggi dapat memperkuat kemampuan akademik serta analisis isu global, sedangkan organisasi kepemudaan dapat menjadi ruang praktik komunikasi dan kerja sama lintas budaya. Pemuda juga perlu didorong untuk menghasilkan konten yang informatif, kreatif, berimbang, dan bertanggung jawab dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia.

Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat diplomasi Indonesia apabila diiringi dengan peningkatan kapasitas pemuda. Pemuda tidak hanya diposisikan sebagai pengguna teknologi, tetapi sebagai aktor non-negara yang mampu berkontribusi dalam membangun komunikasi, kepercayaan, citra positif, dan hubungan antarmasyarakat di tingkat internasional. Penguatan peran tersebut pada akhirnya dapat mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif di tengah perubahan lingkungan hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan digital sebagai upaya persiapan menghadapi tantangan perkembangan teknologi.
- Anholt, S. (2007). *Competitive identity: The new brand management for nations, cities and regions*. Palgrave Macmillan.
- Bjola, C. (2016). Digital diplomacy the state of the art. *Global Affairs*, 2(3), 297-299.
- Bjola, C., & Holmes, M. (Eds.). (2015). *Digital diplomacy: Theory and practice*. Routledge.
- Cho, A., Byrne, J., & Pelter, Z. (2020). *Digital civic engagement by young people*. UNICEF Office of Strategy and Evidence - Innocenti.
- Di Martino, L. (2026). Navigating the tensions between activism and diplomacy: A case study of the UN's Youth Advisory Group on Climate Change. *Journal of Applied Youth Studies*.
- Farhatin, F. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 1494-1502.

- Hikmawan, R., Fathun, L. M., & Astuti, W. R. D. (2024). Digital public diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs through the Instagram account @kemlu_ri regarding Indonesia's G20 presidency in 2022. *Intermestic: Journal of International Studies*, 9(1), 178-197.
- Hocking, B., & Melissen, J. (2015). *Diplomacy in the digital age*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Intentilia, A. A. M. (2022). Indonesia's G20 presidency 2022: Connecting soft power and digital diplomacy practice on Instagram. *Indonesian Perspective*, 7(2), 145-163.
- Juliani, E. N. (2026). Diplomasi digital Amerika Serikat melalui media sosial sebagai instrumen soft power di Indonesia tahun 2023-2024. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 2(2).
- Mahfudzi, N. el. (2020). Tata kelola perlindungan warga negara Indonesia dalam melakukan peran diplomasi digital. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 19-38.
- Manor, I. (2023). The road not taken: Why digital diplomacy must broaden its horizons. *Place Branding and Public Diplomacy*, 19(2), 206-210.
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement: Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 75-85.
- Nye, J. S., Jr. (2008). Public diplomacy and soft power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94-109.
- Prasetio, K., & Santoso, M. (2026). Indonesia's public diplomacy strategy through Instagram @kemlu-ri in shaping a positive image in ASEAN (2020-2024). *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 23(1), 27-37.
- Sevin, E., & Ingenhoff, D. (2018). Public diplomacy on social media: Analyzing networks and content. *International Journal of Communication*, 12, 3663-3685.